

Asap Tembakau Menyelimuti Logika

RPP tentang Pengendalian Tembakau menuai protes dari sejumlah kalangan. Para pemrotes di antaranya adalah mereka yang menamakan diri Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) serta Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (Gaprindo). Tak ketinggalan, tentu saja, adalah perusahaan-perusahaan rokok. Bahkan, Bupati Temanggung Hasyim Afandi adalah salah seorang yang berada di garda depan demonstrasi menentang RPP tersebut (Koran Tempo, 2 Maret 2010). Memang, sejumlah daerah seperti Boyolali, Magelang, Kendal, Grobogan dan Temanggung diperkirakan akan mengalami dampak terbesar kalau beleid itu jadi dituangkan sebagaimana yang dirancang oleh Departemen Kesehatan.

Memang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Kesehatan, RPP itu belum lagi melalui pembahasan antardepartemen. Namun, para pemrotes sangat khawatir bahwa kepentingan ekonomi mereka akan terganggu lantaran RPP itu mengusulkan pembatasan banyak hal mengenai rokok. Jadi, protes yang dilancarkan oleh mereka dinyatakan sebagai masukan untuk pembahasan selanjutnya. Di situ dinyatakan bahwa iklan rokok akan dilarang secara total; perusahaan dan merek rokok dilarang menjadi sponsor acara; program di bawah naungan 'CSR' industri rokok yang bisa menjadi Kuda Troja promosi juga tidak diperkenankan; penjualan rokok tak boleh lagi dilakukan secara eceran; pun demikian dengan penjualan kepada calon pembeli di bawah umur dan perempuan hamil.

Dalam kalkulasi para pemrotes, semua larangan itu akan berbuntut pada penjualan rokok yang menyusut, lalu kemudian berpengaruh pada total nilai ekonomi industri rokok, dan berdampak negatif pada kehidupan para penyokong industri rokok seperti penjual, pekerja, serta petani tembakau dan cengkeh. Perlawanan atas pembatasan apapun terkait rokok memang selalu timbul dari pihak-pihak yang khawatir kepentingan ekonominya itu dirugikan. Bahkan Pemerintah RI yang menjadi satu-satunya pemerintahan di ASEAN—dan minoritas di seluruh dunia—yang belum meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) oleh mereka pun dilarang mengikatkan diri pada konvensi tersebut, lagi-lagi karena alasan ekonomi.

Bangsa ini juga telah sangat menderita secara ekonomi karena rokok.

Apakah benar kepentingan ekonomi pihak-pihak tersebut seharusnya membuat bangsa ini surut dari semangat regulasi yang lebih ketat atas rokok? Bagaimana dengan kepentingan ekonomi pihak lain? Bagaimana dengan kepentingan ekonomi skala yang lebih luas seperti negara ini? Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa rokok adalah penyebab banyak sekali masalah ekonomi rumah tangga miskin. Konsumsi rokok itu telah dibuktikan tidak netral skala. Semakin miskin rumah tangga di Indonesia, semakin tinggi proporsi sumberdaya finansial yang dipergunakan untuk membeli rokok. Karena proporsi yang tinggi itu pula, banyak keluarga miskin yang mengorbankan kepentingan lain, terutama makanan bergizi serta pendidikan. Kepulan asap rokok sering kali mematikan kepanasan dapur, dan lintingan kertas rokok kerap dipandang lebih penting didahulukan daripada lembaran kertas yang menyusun buku pelajaran.

Bangsa ini juga telah sangat menderita secara ekonomi karena rokok. Memang, cukai rokok, pajak dari industri tersebut, serta efek pengganda yang timbul bukanlah jumlah rupiah yang bisa diremehkan. Mereka menyusun komponen yang lumayan signifikan di dalam kolom pendapatan di APBN. Namun, ketika itu semua ditimbang dengan hitungan ekonomi yang lebih canggih, maka ternyata rokok bukanlah penyumbang ekonomi yang positif. Dampak kesehatan dari konsumsi rokok telah dihitung dengan saksama, dan itu jauh sekali melampaui nilai ekonomi yang digembar-gemborkan para pendukung industri rokok. Industri rokok hanya tampil moncer manakala segala dampaknya dihitung sebagai eksternalitas belaka, dan harus ditanggung sendiri oleh para perokok, keluarganya, dan mereka yang terpaksa menghirup asap rokok akibat kebebasan merokok hampir tanpa batas di negeri ini.

Kesimpulannya, tanpa perlu mempertontonkan angka, dalam hitung-hitungan yang lebih adil—yaitu hitungan atas dampak bersih (dampak positif minus dampak negatif)—nilai ekonomi rokok adalah negatif. Sehingga, secara logika jernih yang tak diselimuti hal-hal lain, industri rokok haruslah dibatasi secara ketat, bukannya terus dikembangkan. Di sinilah kemudian harus diteguhkan bahwa bangsa ini seharusnya mendukung apa yang diperjuangkan dalam RPP tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang selama ini menggantungkan hidupnya dari industri rokok? Kita tentu tak bisa berpangku tangan membiarkan mereka benar-benar sendirian menanggung beban akibat kemungkinan menyusutnya sumber-sumber penghasilan yang mereka andalkan selama ini.

Bagaimanapun sebuah peta jalan untuk membantu mereka keluar dari ketergantungan itu harus dipersiapkan. Kabupaten-kabupaten yang selama ini PAD-nya sangat tergantung dari industri rokok harus dibantu melihat dan mengembangkan potensi-potensi lainnya. Analisis kecocokan lahan, usahatani, dan pemasaran yang detail harus dilakukan untuk membantu petani-petani tembakau dan cengkeh bisa mendapatkan alternatif yang lebih baik. Beberapa penelitian sebetulnya menunjukkan bahwa selama ini pun sebetulnya usahatani tembakau dan cengkeh bukanlah termasuk yang benar-benar bisa diandalkan oleh mereka, sehingga penggantian komoditas tampaknya adalah suatu keniscayaan. Sementara peningkatan keterampilan bagi pekerja harus dilakukan secara masif agar mereka bisa tertampung di industri lain. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan

Itu semua harus dipikirkan dengan serius kalau benar kita ingin mencapai tujuan mulia pembatasan rokok tanpa mengorbankan saudara-saudara sendiri

permodalan untuk memandirikan dirinya—baik itu petani, pekerja maupun pedagang—akses atasnya juga harus disediakan.

Itu semua harus dipikirkan dengan serius kalau benar kita ingin mencapai tujuan mulia pembatasan rokok tanpa mengorbankan saudara-saudara sendiri. Selama ini, rokok telah mengorbankan banyak orang, namun pembatasannya tak boleh jadi semacam ajang balas dendam.

Bogor, 5 Maret 2010

Jalal, Lingkar Studi CSR



Lingkar Studi CSR

Jln. Danau Sentani Blok C VII No.9 Kompleks Duta Pakuan

Bogor 16144 Indonesia

Telp. (0251) 336349, Fax. (0251) 336349

www.csrindonesia.com, e-mail:office@csrindonesia.co

Tulisan ini dibuat dengan tujuan utama menyebarluaskan pengetahuan mengenai CSR kepada seluruh pemangku kepentingan. Silakan mengutip dan menyebarluaskan tulisan ini apabila Anda mempunyai tujuan yang sama. Kami berharap agar sumber tulisan bisa diberitahukan se jelas mungkin kepada pihak lain yang menerima kutipan sebagian atau seluruh isi tulisan. Terima kasih.